



**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)**



**ORGANISASI PERANGKAT DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2023**

**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
DINAS PERHUBUNGAN**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan Karunianya sehingga alhamdulillah penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2023 dapat terselesaikan.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 ini merupakan kewajiban setiap Instansi Pemerintah sesuai Instruksi Presiden No.7 Tahun 1999 sebagai bentuk pertanggung jawaban dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang dituangkan dalam Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2023.

Tersusunnya LKjIP Tahun 2023 ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, untuk itu izinkan kami dalam kesempatan yang baik ini menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian laporan ini. Harapan kami dengan tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2023 ini kiranya dapat memberikan gambaran kepada Bupati Lombok Timur mengenai pelaksanaan tugas selama Tahun 2023, selanjutnya dapat mengambil kebijakan dengan mengarah pada pencapaian Visi Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur.

Selang, 02 Januari 2024  
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,  
  
**Drs. ISWAN RAKHMADI, M.M.**  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19691216 198903 1 006

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b>	
1.1.    Latar Belakang .....	1
1.2.    Dasar Hukum .....	1
1.3.    Tugas Pokok dan Fungsi .....	2
1.4.    Gambaran Umum Dinas Perhubungan Kab. Lotim .....	3
1.5.    Kepegawaian .....	8
1.6.    Isu Strategis / Permasalahan.....	9
<b>BAB II   PERENCANAAN KINERJA</b>	
2.1.    Visi dan Misi .....	13
2.2.    Tujuan dan Sasaran .....	13
2.3.    Kebijakan .....	18
2.4.    Rencana Kerja Tahunan.....	19
<b>BAB III  AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
3.1.    Capaian Kinerja Organisasi .....	23
3.2.    Realisasi Anggaran.....	39
<b>BAB IV  PENUTUP</b>	
4.1.    Kesimpulan .....	44
4.2.    Saran dan Rekomendasi .....	45
<b>LAMPIRAN - LAMPIRAN</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Sesuai amanat Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN, mengamanatkan bahwa penyelenggaraan negara harus mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dengan menyelenggarakan pemerintahan yang Transparan, Partisipatif, Akuntabel, Berdaya guna, berhasil guna serta bebas dari KKN.

Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur merupakan instansi yang membantu Bupati Lombok Timur dalam bidang Perhubungan sesuai instruksi Presiden RI Nomor 7 tahun 1999 berkewajiban untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan mempertanggungjawabkan melalui media Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini merupakan evaluasi terhadap Rencana Kerja kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur tahun 2023 yang disusun berdasarkan Renstra Dinas Perhubungan 2018-2023 dan dijabarkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2023.

### **1.2. Dasar Hukum**

Dasar hukum dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini adalah :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Surat Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaporan Akintabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Tujuan Penyusunan LKjIP Ini adalah :

- a. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya tercapai;
- b. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungannya bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerja.

### **1.3. Tugas Pokok dan Fungsi**

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur, Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur mempunyai tugas membantu Bupati Lombok Timur dalam Urusan Pemerintahan

Daerah di Bidang Perhubungan baik Perhubungan Darat dan Perhubungan Laut sebagaimana terdapat pada Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan, dengan fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan Rencana Strategis Bidang Perhubungan;
2. Perumusan kebijakan teknis Bidang Perhubungan;
3. Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang sarana dan prasarana perhubungan darat dan laut, pengendalian dan operasional perhubungan darat dan laut;
4. Pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang Perhubungan;
5. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas di bidang Perhubungan;
6. Pelaksanaan kegiatan penatausahaan Dinas;
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **1.4. Gambaran Umum Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur**

Berdasarkan Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perhubungan, maka Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur mempunyai :

##### **1.4.1. Struktur Organisasi**

Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur dipimpin oleh seorang Kepala, dimana Kepala Dinas Perhubungan dibantu oleh seorang Sekretaris Dinas Perhubungan dan 3 (Tiga) orang Kepala Bidang. Secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kepala;
2. Sekretariat, meliputi sub bagian :

- ✚ Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - ✚ Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan.
3. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, terdiri atas:
    - ✚ Subkoordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional;
    - ✚ Seksi Angkutan; dan
    - ✚ Seksi Keselamatan.
  4. Bidang Prasarana, terdiri atas:
    - ✚ Subkoordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional;
    - ✚ Seksi Pengoperasian Prasarana; dan
    - ✚ Seksi Perawatan Prasarana.
  5. Bidang Pengembangan dan Teknik, terdiri atas:
    - ✚ Subkoordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional
    - ✚ Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan;
    - ✚ Seksi Lingkungan Perhubungan; dan
  6. UPT Pelabuhan Lokal Labuhan Haji.

#### **1.4.2. Tugas pokok dan Fungsi masing-masing sub unit**

##### **1.4.2.1. Tugas Pokok**

Tugas pokok masing-masing sub unit adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepala daerah;
2. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unit organisasi di lingkungan dinas.
  - ✚ Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok Melaksanakan urusan kepegawaian, organisasi, tata laksana, pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik, arsip dan dokumentasi, rumah tangga dan perlengkapan, serta urusan tata usaha;

- ✚ Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja, pengelolaan administrasi keuangan, monitoring dan evaluasi;
3. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan Kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan;
- ✚ Seksi Angkutan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan terkait penyelenggaraan angkutan di daerah;
  - ✚ Seksi Keselamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang keselamatan;
4. Bidang Prasarana mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis dibidang Perencanaan dan pembangunan prasarana, pengoperasian prasarana dan perawatan prasarana;
- ✚ Seksi Pengoperasian Prasarana mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan melaksanakan kebijakan pengoperasian prasarana;
  - ✚ Seksi Perawatan Prasarana mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang perawatan prasarana di daerah;
5. Bidang Pengembangan dan Teknik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan dan teknik.
- ✚ Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang pemaduan moda dan pengembangan teknologi perhubungan;
  - ✚ Seksi Lingkungan Perhubungan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan



kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan lingkungan perhubungan;

#### **1.4.2.2. Fungsi**

Fungsi masing-masing sub unit adalah sebagai berikut :

##### **1. Sekretariat mempunyai fungsi**

- a. Pengoordinasian penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi, dan pelaporan Dinas;
- b. penyusunan konsep rencana strategis Dinas;
- c. penyusunan konsep kebijakan Pemerintah Daerah dibidang perhubungan;
- d. pemberian dukungan administrasi yang meliputi kepegawaian, ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan, dan dokumentasi;
- e. penataan organisasi dan tata laksana;
- f. pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- g. pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah;
- h. penyelenggaraan penilaian kinerja di lingkup Dinas;
- i. penyusunan konsep kebijakan Dinas untuk pengelolaan program dan pelaporan, keuangan, urusan umum dan kepegawaian; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

##### **2. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan**

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang lalu lintas, angkutan, dan keselamatan;

- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan dibidang lalu lintas, angkutan, dan keselamatan;
- c. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan dibidang lalu lintas, angkutan, dan keselamatan;
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh KepalaDinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

### **3. Bidang Prasarana**

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perencanaan, pembangunan prasarana, pengoperasian prasarana dan perawatan prasarana;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan dibidang perencanaan, pembangunan prasarana, pengoperasian prasarana dan perawatan prasarana;
- c. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan dibidang perencanaan, pembangunan prasarana, pengoperasian prasarana dan perawatan prasarana; dan
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh KepalaDinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

### **4. Bidang Pengembangan dan Teknik**

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang Pemaduan moda, teknologi perhubungan, lingkungan perhubungan, dan pengujian sarana dan terminal;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan dibidang pemaduan moda, teknologi perhubungan, lingkungan perhubungan dan pengujian sarana dan terminal;
- c. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pemaduan moda, teknologi perhubungan, lingkungan perhubungan, dan pengujian sarana dan terminal; dan
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

## 1.5. Kepegawaian

Jumlah Pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur keadaan per 31 Desember 2023 berjumlah 43 orang dengan rincian laki-laki berjumlah 41 orang dan perempuan berjumlah 2 orang

Bila dibandingkan dengan keadaan pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur tahun 2022 tidak ada perbedaan karena berjumlah sama yakni sebanyak 43 orang.

Jumlah PNS berdasarkan status pegawai dan Tingkat pendidikan pada Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1

Jumlah karyawan/karyawati berdasarkan tingkat pendidikan pada Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur keadaan 31 Desember 2023

No	Status Pegawai	SD	SMP	SMA	DIII	S1	S2	S3	Jumlah
1.	PNS			18	2	20	3	-	43
2.	CPNS	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>			-	<b>18</b>	<b>2</b>	<b>20</b>	<b>3</b>	-	<b>43</b>

Berdasarkan tabel diatas bahwa keberadaan Sumber Daya Manusia pada Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur termasuk sudah memadai untuk menangani berbagai persoalan perencanaan pembangunan di bidang Perhubungan dengan jumlah pegawai yang sudah berpendidikan Sarjana baik itu Sarjana Strata Satu (S1) maupun Sarjana Strata Dua (S2) 53,48 persen dari total PNS yang ada. Dengan kata lain dengan kondisi pada saat ini dengan keadaan pegawai pada Dinas Perhubungan, kemampuan Dinas Perhubungan dalam bidang Perencanaan dianggap cukup teruji dengan dukungan yang sangat kuat dari pegawai yang ada apalagi dilihat dari jenjang pendidikan yang dimiliki oleh Karyawan Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur sedangkan tenaga teknis yang khusus menangani perhubungan darat, laut dan sarana teknik

masih sangat dibutuhkan tenaga teknis yang kualifikasinya sesuai dengan bidang tersebut (tenaga sesuai kualifikasi pendidikan masih sangat kurang).

Selanjutnya tabel 2 dibawah ini akan menguraikan jumlah pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur berdasarkan jabatan atau eselon.

Tabel 2

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan Jabatan/Eselon pada Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur Keadaan 31 Desember 2023

No	Pegawai/karyawan Menurut Jabatan/Eselon (Orang)						
	Jenis Kelamin	Eselon					Jumlah
		V	IV	III	II	I	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Laki-laki	-	12	4	1	-	17
2	Perempuan	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	-	12	4	1		17

Berdasarkan data di atas, semua jabatan yang ada dalam Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur sudah terisi.

### 1.6. Isu Strategis / Permasalahan

Secara umum permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur Triwulan III Tahun Anggaran 2023 dapat diuraikan sebagai berikut:

#### ❖ Sekretariat

- Tidak dapat terselenggaranya bimbingan teknis bagi pegawai dalam Diklat Teknis Perhubungan Darat dan Perhubungan Laut baik dalam daerah, provinsi maupun ditingkat pusat untuk meningkatkan SDM pegawai dinas perhubungan;
- Kurangnya tenaga di sub bagian keuangan dan pelaporan yang memiliki basic akutansi;

### ❖ **Bidang Lalu Lintas dan Angkutan**

Kurangnya Tenaga Teknis antara lain :

- Staf teknis yang menangani urusan manajemen rekayasa lalu lintas belum ada;
- Belum tersedianya tenaga PPNS bidang LLAJ;
- Kurangnya tenaga operator komputer;

### ❖ **Bidang Pengembangan dan Teknik**

a. Kurangnya tenaga teknis antara lain :

- Tenaga Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor;
- Tidak tersedianya anggaran untuk Diklat penjenjangan kompetensi penguji kendaraan.

b. Kurang Optimalnya Hasil Pengujian Kendaraan Bermotor :

- Brake Tester/Alat Uji Rem Utama Kendaraan, hasil uji efisiensi rem kiri dan kanan tidak berfungsi/rusak;
- Axle Load Meter tidak berfungsi (Rusak Berat);
- Axle Play Detector/Alat Uji Suspensi tidak berfungsi maksimal.

c. Gedung Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor masih kurang representatif, seperti ruang tunggu pelayanan uji yang sempit dan kurang nyaman, tidak tersedianya toilet khusus bagi wajib retribusi pada ruang pelayanan;

d. Belum maksimalnya perlengkapan standar keselamatan kerja bagi penguji kendaraan bermotor;

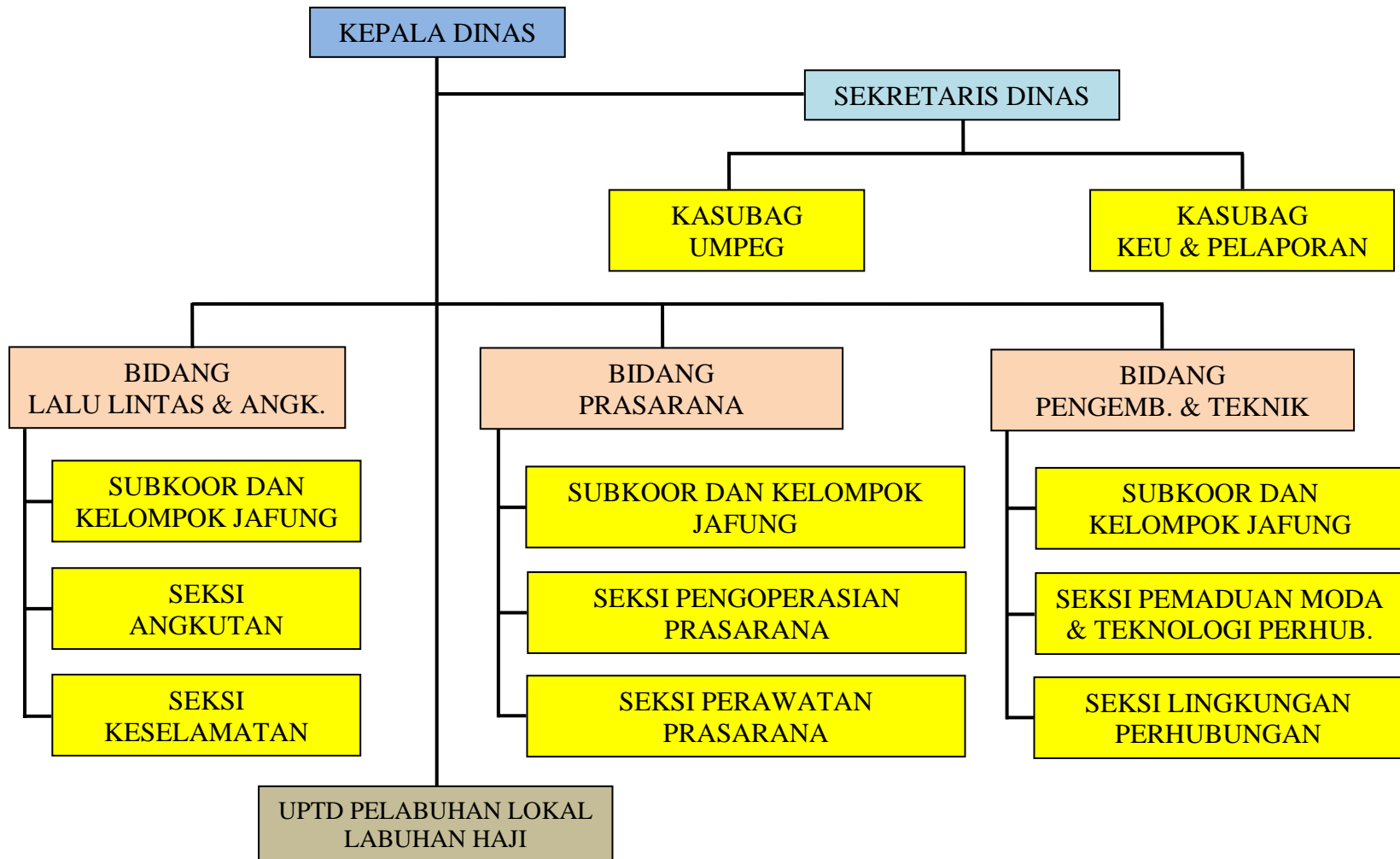
e. Kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pada seksi Lingkungan Perhubungan, seperti peralatan keselamatan dan pendukung kegiatan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan;

f. Tidak tersedianya staf yang memiliki kompetensi pemeliharaan APILL.

## ❖ **Bidang Prasarana**

- a. Kurangnya Tenaga Teknis :
  - Tenaga S1 Teknik Perkapalan;
  - Tenaga S1 Manajemen Transportasi Laut;
  - Tenaga Diploma IV/Diploma III Nautika ANT-III;
  - Tenaga Diploma IV Ketatalaksanaan Angkutan Laut dan Kepelabuhan/KALK;
  - Diploma III Ketatalaksanaan Pelayaran Niaga/Manajemen Transportasi Laut.
- b. Terbatasnya staf PNS, sehingga untuk berbagi tugas dan pelaksanaan kegiatan tidak efektif;
- c. Permasalahan pada bidang Prasarana dalam keterkaitannya dengan pelabuhan dapat dilihat sebagai berikut :
  - Seksi Pengoperasian Prasarana :
    1. Penarikan Retribusi Pas Masuk, Sewa Fasilitas Pemerintahan Daerah Kabupaten Lombok Timur, Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Jasa Kepelabuhanan.
    2. Pelabuhan Lokal Labuhan Haji :
      - a. Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung dermaga Pelabuhan lokal labuhan haji, seperti gudang pelabuhan, fasilitas bongkar muat, dan lain lain.

Grafik 1  
 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur  
 Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2022



## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **2.1. Visi dan Misi**

Perencanaan pembangunan daerah hendaknya disesuaikan dengan paradigma baru dan memperhatikan keseimbangan dalam kesatuan wilayah pembangunan ekonomi, sosial, budaya, politik dan aparatur pemerintahan untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Untuk itu Visi Kabupaten Lombok Timur dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan Kabupaten Lombok Timur kurun waktu tahun 2018-2023 adalah **“LOMBOK TIMUR YANG ADIL, SEJAHTERA DAN AMAN “**.

Untuk mencapai Visi diatas, maka **Misi Kabupaten Lombok Timur** adalah :

1. Membangun dan Meningkatkan Infrastruktur Wilayah secara berimbang pada Bidang Transportasi, Energi, Irigasi, Air Bersih serta Perumahan.
2. Meningkatkan mutu pelayanan pendidikan yang berdaya saing dan mutu pelayanan kesehatan dengan biaya terjangkau.
3. Menumbuh kembangkan perekonomian masyarakat yang bertumpu pada pengembangan potensi lokal melalui sinergi fungsi-fungsi pertanian, peternakan, perikanan, perdagangan dan kelautan, pariwisata dan sumberdaya lainnya.
4. Memperkuat pemberdayaan perempuan dalam pembangunan sosial, politik, pencegahan kekerasan dalam rumah tangga dan perlindungan anak, serta meningkatkan pembinaan kepemudaan dan olah raga
5. Meningkatkan pembangunan kehidupan keagamaan masyarakat yang lebih baik dan religius, serta menciptakan keamanan dan ketertiban yang harmonis.
6. Mendorong reformasi birokrasi yang sungguh –sungguh dan pemekaran wilayah pemerintahan desa, kecamatan dan kabupaten untuk menuju aparatur yang bersih, beorientasi kepada pelayanan publik.

#### **2.2. Tujuan dan Sasaran**

**VISI** : Lombok Timur Yang Adil, Sejahtera dan Aman.  
**MISI** : Membangun dan meningkatkan infrastruktur wilayah secara berimbang pada bidang transportasi, energi, irigasi, air bersih serta perumahan.



**TUJUAN** : Meningkatkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Wilayah secara Berimbang pada Bidang Transportasi Darat dan Laut.

**INDIKATOR TUJUAN** : Indeks Sarana Perhubungan.

**SASARAN** : Terwujudnya Pelayanan Transportasi yang Handal, Berdaya Saing dan Memberikan Nilai Tambah dalam Rangka Mewujudkan Konektivitas Antar Simpul dan Moda Transportasi.

**INDIKATOR SASARAN** : Presentase Fasilitas Keselamatan Jalan.

Adapun Sasaran / Perjanjian Kinerja Pejabat Struktural Lingkup Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur, diuraikan pada tabel berikut ini

No	Uraian Jabatan	Sasaran	Indikator	Target
1.	Eselon II (Kepala Dinas)	Meningkatnya Sarana Prasarana Perhubungan Bidang Transportasi Darat dan Laut	Persentase Sarana dan Prasarana Transportasi yang memadai	60%
2.	Sekretaris	Meningkatnya Nilai SAKIP OPD	Nilai SAKIP OPD	BB
3.	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian	Meningkatnya Nilai SAKIP OPD melalui Penyelenggaraan dan Pelayanan Umum dan Kepegawaian	Persentase Terlaksananya Pelayanan Umum Perangkat Darah	100 %
			Persentase Capaian Layanan Jasa Penunjang	100 %
			Persentase Pengelolaan Aset/Barang Milik Daerah	100 %
4.	Kasubbag Keuangan dan Pelaporan	Meningkatnya Nilai SAKIP OPD melalui Pemenuhan Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja serta Penatausahaan Keuangan yang	Terpenuhinya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	9 Dokumen
			Terpenuhinya Pelaporan dan Ikhtisar Realisasi Kinerja tepat Waktu	5 Dokumen

No	Uraian Jabatan	Sasaran	Indikator	Target
		berkualitas	Terpenuhinya Administrasi dan Pelaporan Penatausahaan Keuangan sesuai Rencana	2 Dokumen
5.	Es. III (Kabid Pengembangan dan Teknik)	Meningkatnya Sarana Prasarana Perhubungan Bidang Transportasi Darat melalui Pengembangan dan Teknologi Perhubungan	Persentase Tersedianya Fasilitas Keselamatan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	83 %
			Persentase Peningkatan Kendaraan yang Laik Uji di Jalan Utk Meningkatkan Keselamatan Berlalu Lintas	83 %
6.	Kasi Pemanduan Moda dan Teknologi Pehubungan	Meningkatnya Kualitas Ketersediaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	80 Unit
7.	Kasi Lingkungan Perhubungan	Tersedianya Perlengkapan Jalan yang Memadai	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	6 Unit
8.	Subkoor. Pengujian Sarana dan Terminal	Tersedianya Sarana Prasarana dan Layanan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang memadai	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	5.500 Dokumen
			Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	3.000 Unit
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala	14 Unit

No	Uraian Jabatan	Sasaran	Indikator	Target
			Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	
		Tersedianya Fasilitas Layanan Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Tipe C Yang Memadai	Persentase Layanan Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan yang memadai	80 %
9.	Es. III (Kabid Lalu Lintas dan Angkutan)	Meningkatnya Sarana Prasarana Perhubungan Bidang Transportasi Darat melalui Layanan Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang Tertib dan Aman	Persentase Peningkatan Pelayanan Angkutan Perkotaan dan Pedesaan Antar Moda yang Fleksibel	80 %
			Persentase Peningkatan Layanan Penyelenggaraan Lalu Lintas yang tertib dan Aman	78 %
10.	Kasi Angkutan	Terselenggaranya Layanan Angkutan Jalan dan Perparkiran yang tertib dan Aman	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyelenggaraan Layanan Angkutan jalan yang tertib dan aman	12 Laporan
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyelenggaraan Perparkiran yang tertib dan Aman	12 Laporan
11.	Kasi Keselamatan	Terselenggaranya Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas yang tertib dan Aman	Jumlah laporan Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas	12 Laporan
12.	Subkoor. Lalu Lintas	Terlaksananya Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah laporan Pelaksanaan Rekayasa Lalu	12 Laporan

No	Uraian Jabatan	Sasaran	Indikator	Target
		Jaringan Jalan yang tertib dan Aman	Lintas Jaringan Jalan	
13.	Es. III (Kabid Prasarana)	Meningkatnya Sarana Prasarana Perhubungan Bidang Transportasi Laut Melalui Pembangunan, Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Memadai	Persentase Pembangunan, Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal yang memadai	80 %
14.	Kasi Pengoperasian Prasarana	Terlaksananya Pengawasan Pengoperasian Prasarana Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Optimal	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Prasarana Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Optimal	12 Laporan
15.	Kasi Perawatan Prasarana	Tersedianya Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara secara Optimal	Jumlah Laporan Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara secara Optimal	12 Laporan
16.	Subkoor. Perencanaan dan Pembangunan Prasarana	Tersedianya Perencanaan dan Pengembangan Prasarana Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Laporan Perencanaan dan Pengembangan Prasarana Pelabuhan Pengumpan Lokal	4 Laporan
17.	Kepala UPTD. PLLH	Meningkatnya Sarana Prasarana Perhubungan Bidang Transportasi Laut Melalui Pelayanan Kepelabuhanan Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Optimal	Jumlah Laporan Pelayanan Kepelabuhanan Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Optimal	12 Laporan
18.	KTU UPTD PLLH	Terselenggaranya Pelayanan Kepelabuhanan Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Optimal	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pelayanan Kepelabuhanan Pelabuhan Pengumpan Lokal	12 Laporan

### 2.3. Kebijakan

Untuk mencapai sasaran diatas ditempuh berbagai kebijakan yaitu :

Sasaran Program	Indikator Program	Indikator Sasaran	Arah Kebijakan
<b>SASARAN PERANGKAT DAERAH (P1)</b>			
1. Terwujudnya Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan yang tepat, cepat, aman dan nyaman yang berkesinambungan secara terpadu dan menyeluruh Untuk Transportasi Nasional	Tersedianya sarana dan prasarana transportasi yang memadai	Prosentase Kemantapan Sarpras perhubungan	Koordinasi terintegrasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta peningkatan DAK, TP, APBN, APBD I dan APBD II
2. Meningkatnya pelayanan angkutan perkotaan dan pedesaan antar moda yang fleksibilitas, akurat, nyaman dan selamat	2.1 Tersedianya sarana prasarana wilayah yang seimbang/ proporsional 2.2 Tersedianya sistem jaringan transportasi yang memadai	Prosentase Kualitas Pelayanan dan Tingkat Koordinasi	Koordinasi, regulasi, konstruksi dan fasilitasi sistem jaringan transportasi yang diarahkan pada sistem jaringan lokal
3. Meningkatkan Kualitas Pelayanan dan Pelayaran	3.1 Meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas antar kawasan, antar kota dan antar wilayah 3.2 Tersedianya subsidi transportasi	Menerbitkan Izin Pembangunan Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan lokal	Koordinasi, konsultansi, revitalisasi dan konstruksi sarana dan prasarana wilayah yang diarahkan pada sistem perhubungan laut sesuai pengembangan sistem jaringan infrastruktur dalam Kabupaten

<b>Sasaran Program</b>	<b>Indikator Program</b>	<b>Indikator Sasaran</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
			Lombok Timur
<b>SASARAN PERANGKAT DAERAH (P2)</b>			
1. Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Tersedianya sarana prasarana Fasilitas keselamatan jalan	Prosentase sarana dan alat uji kendaraan bermotor yang siap pakai	Mengikuti sertakan Aparatur dalam berbagai kegiatan Diklat Profesi
2. Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Meningkatkan konektivitas antar pemangku kebijakan	Prosentase Terkendalinya Keamanan Lalu Lintas	Koordinasi dan Konsultasi

## **2.4. Rencana Kerja Tahunan**

Rencana kerja tahunan yang dilaksanakan pada Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur tetap mengacu pada tugas pokok dan fungsi Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur yang bertugas membantu Bupati Lombok Timur dalam merencanakan, mengevaluasi pelaksanaan program pembangunan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten Lombok Timur termasuk melaksanakan tugas-tugas lain yang dipercayakan Bupati Lombok Timur.

Program yang dilaksanakan pada tahun 2023 juga diarahkan dengan tetap mengacu pada terlaksananya dukungan pada tercapainya tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur selaku kordinator pembangunan khususnya dalam bidang Perhubungan.

Untuk mencapai Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan diatas maka ditempuh berbagai program dan kegiatan pada tahun 2023 yaitu :

### **2.4.1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**

Program ini diarahkan untuk mendukung dan meningkatkan jasa pelayanan perkantoran dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
2. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;

### **2.4.2. PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**

Program ini diarahkan untuk meningkatkan Fasilitas Angkutan Darat dan Angkutan Laut yang terintegrasi dengan semua wilayah dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota;
2. Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir;
3. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;

#### **2.4.3. PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**

Program ini diarahkan Tersusunnya perencanaan hasil Penelitian/ survey tatanan transportasi lokal yang menjadi acuan pembangunan di Lombok Timur dengan kegiatan Sebagai berikut;

1. Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal.

**MATRIKS II. 1**  
**Indikator Kinerja Utama (IKU)**  
**Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur**

Unit Kerja : Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur

Tugas Pokok : Membantu Bupati Lombok Timur dalam Penyelenggaraan Kewenangan di Bidang Perhubungan

<b>TUJUAN / SASARAN</b>		<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>PENJELASAN FORMULASI PERHITUNGAN</b>	<b>TARGET</b>
<i>1</i>		<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Tujuan	Meningkatkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Wilayah secara Berimbang pada Bidang Transportasi Darat dan Laut	Indeks Sarana Perhubungan	Indeks Pelayanan Jalan yang mencakup Volume dan Kapasitas.	<i>0.20</i>
Sasaran	Terwujudnya Pelayanan Transportasi yang Handal, Berdaya Saing dan Memberikan Nilai Tambah dalam Rangka Mewujudkan Konektivitas Antar Simpul dan Moda Transportasi.	Presentase Fasilitas Keselamatan Jalan	Jumlah Sarpras Perhubungan dalam kondisi baik dibagi jumlah Sarpras Perhubungan x 100%	60 %



**MATRIKS II. 2**  
**RENCANA STRATEJIK**

**INSTANSI** : Dinas Perhubungan  
**VISI** : Terwujudnya transportasi darat dan laut yang handal

MISI	TUJUAN	SASARAN		CARA PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN	
		URAIAN	INDIKATOR	KEBIJAKAN	PROGRAM
1	1	2	3	4	5
Membangun dan Meningkatkan Infrastruktur Wilayah secara Berimbang pada Bidang Transportasi, Energi, Irigasi, Air Bersih serta Perumahan	Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur wilayah secara berimbang pada bidang transportasi darat dan laut	Terwujudnya Pelayanan Transportasi yang Handal, Berdaya Saing dan Memberikan Nilai Tambah dalam Rangka Mewujudkan Konektivitas Antar Simpul dan Moda Transportasi	Terlayannya kebutuhan masyarakat dengan pembangunan sarana dan prasarana transportasi darat dan laut	Peningkatan kualitas pembangunan sektor transportasi darat dan laut baik sarana dan prasarana fasilitas keselamatan jalan dan pemaduan moda antar simpul transportasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)</li> <li>- Program Peningkatan Pelayanan Angkutan</li> </ul>
				Pemanfaatan rencana ruang secara optimal dan sinergis dengan wilayah sekitar	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Program Peningkatan Pelayanan Angkutan</li> <li>- Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)</li> </ul>
				Peningkatan koordinasi Pusat, Propinsi dan Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
				Peningkatan kualitas hasil pembangunan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja sebagai dasar penilaian keberhasilan ataupun kegagalan kegiatan dilakukan dengan menilai kinerja kegiatan dan kinerja sasaran. Pengukuran kinerja kegiatan yaitu menilai indikator-indikator kegiatan yang berupa masukan, keluaran dan hasil sebagaimana dituangkan dalam formulir Pengukuran.

##### A.1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Pengukuran indikator kinerja ini dilakukan dengan menggunakan indikator kuantitatif agar lebih terukur dan memudahkan evaluasi. Penetapan indikator kinerja Dinas Perhubungan sebagai mandat kinerja berdasarkan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur sebagai berikut :

No.	Tujuan / Sasaran OPD	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Tujuan OPD : Meningkatkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Wilayah secara Berimbang pada Bidang Transportasi Darat dan Laut	Indeks Sarana Prasarana Perhubungan	0,20	0,24	83,33
2	Sasaran OPD : Terwujudnya Pelayanan Transportasi yang Handal, Berdaya Saing dan memberikan Nilai Tambah dalam rangka mewujudkan konektivitas antar simpul dan moda Transportasi	Persentase Fasilitas Keselamatan Jalan	60 %	52.33 %	87,22

Berdasarkan tabel diatas untuk Indeks Sarana dan Prasarana Perhubungan sampai dengan bulan Desember 2023 mencapai 83,33%. Indikator kinerja tahun 2023 sebesar 0,24, belum mencapai 100 persen disebabkan karena volume kendaraan yang melalui jalan-jalan yang ada semakin meningkat dengan kapasitas jalan yang tetap, hal ini menunjukkan bahwa konektivitas antar wilayah kabupaten semakin baik dalam mendukung perekonomian dan aktivitas masyarakat.

Sementara untuk capaian persentase fasilitas keselamatan jalan sampai dengan bulan Desember 2023 mencapai 87,22 % dari target yang ditetapkan. Persentase fasilitas keselamatan jalan tidak mencapai 100% karena tidak tersedianya anggaran yang bersumber dari APBD untuk memenuhi jumlah fasilitas keselamatan jalan yang dibutuhkan, kebutuhan tersebut hanya tersedia melalui hibah Kementerian Perhubungan dengan rincian sebagai berikut :

- ✓ Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan (RPPJ) : 8 Unit
- ✓ Guardraill (Pagar Pengaman Jalan) : 108 Meter
- ✓ Lampu Penerangan Jalan Tenaga Surya : 50 Unit
- ✓ Rambu Lalu Lintas : 67 Unit

Data Persentase Capaian Fasilitas Keselamatan Jalan Tahun 2023

No	Jenis Fasilitas Keselamatan Jalan	Satuan	Target	Realisasi
1.	Traffic Light	Unit	15	10
2.	Rambu Lalu Lintas	Buah	1.500	1.121
3.	RPPJ	Unit	50	30
4.	Guardraill	Meter	1.200	800
5.	Road Barrier	Buah	50	30
6.	Portal	Unit	10	5
7.	Deliniator	Buah	100	70
8.	Penerangan Jalan Umum	Unit	25.000	12.546
9.	ZOSS	Lokasi	20	12
<b>Jumlah</b>		<b>Unit</b>	<b>27.945</b>	<b>14.624</b>
<b>Persentase</b>		<b>%</b>		<b>52.33</b>

## A.2. Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja OPD Tahun 2023 dengan 2 (dua) Tahun Sebelumnya

Untuk memenuhi target IKU Kepala Daerah, Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur menetapkan Sasaran Strategis “Mewujudkan Pelayanan Transportasi yang Handal, Berdaya Saing dan Memberikan Nilai Tambah dalam rangka mewujudkan konektivitas antar simpul dan moda transportasi” dengan Indikator Kinerja Utama sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2023 adalah “Persentase Fasilitas Keselamatan Jalan”. Adapun uraian capaian Kinerja sampai dengan bulan September 2023 sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini:

No	Tujuan / Sasaran OPD	Indikator Kinerja	Sat.	Bulan Desember Tahun 2023			Tahun Sebelumnya	
				Target (%)	Realisasi (%)	%	2022	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<i>Tujuan OPD : Meningkatkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Wilayah secara Berimbang pada Bidang Transportasi Darat dan Laut</i>	<i>Indeks Sarana Prasarana Perhubungan</i>	%	0,20	0,24	83,33	0.24	0.24
2	<i>Sasaran OPD : Terwujudnya Pelayanan Transportasi yang Handal, Berdaya Saing dan memberikan Nilai Tambah dalam rangka mewujudkan konektivitas antar simpul dan moda Transportasi</i>	<i>Persentase Fasilitas Keselamatan Jalan</i>	%	60	52.33	87,22	42.22	39.96

Data Persentase Capaian Fasilitas Keselamatan Jalan Tahun 2021-2023

No	Jenis Fasilitas Keselamatan Jalan	Satuan	Target	Capaian		
				2021	2022	2023
1.	Traffic Light	Unit	15	8	9	10
2.	Rambu Lalu Lintas	Buah	1.500	982	1.059	1.121
3.	RPPJ	Unit	50	12	28	30
4.	Guardrail	Meter	1.200	800	800	800
5.	Road Barrier	Buah	50	30	30	30
6.	Portal	Unit	10	5	5	5
7.	Deliniator	Buah	100	70	70	70
8.	Penerangan Jalan Umum	Unit	25.000	9.250	9.786	12.546

No	Jenis Fasilitas Keselamatan Jalan	Satuan	Target	Capaian		
				2021	2022	2023
9.	ZOSS	Lokasi	20	10	12	12
<b>Jumlah</b>		<b>Unit</b>	<b>27.945</b>	<b>11.167</b>	<b>11.799</b>	<b>14.624</b>
<b>Persentase</b>		<b>%</b>		<b>39.96</b>	<b>42.22</b>	<b>52.33</b>

### A.3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah

Kualitas birokrasi dan pengelolaan pembangunan dijabarkan dalam cara pandang dalam pengelolaan perencanaan pembangunan yang Aspiratif, Akomodatif, Inovatif dan Berkualitas. Adapun Sasaran yang ingin dicapai dalam rangka mendukung keberhasilan mewujudkan **Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur** dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan Kabupaten Lombok Timur target jangka menengah adalah **“Terwujudnya Pelayanan Transportasi yang Handal, Berdaya Saing dan Memberikan Nilai Tambah dalam Rangka Mewujudkan Konektivitas Antar Simpul dan Moda Transportasi”**.

Adapun realisasi kinerja sampai dengan akhir tahun 2023 dibandingkan dengan target jangka menengah berdasarkan perencanaan strategis organisasi diuraikan pada tabel berikut ini :

No.	Tujuan / Sasaran OPD	Indikator Kinerja	Realisasi			Target Akhir Renstra
			2021	2022	2023	
1.	Tujuan OPD : Meningkatkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Wil. secara Berimbang pada Bidang Transportasi Darat & Laut	Indeks Sarana Prasarana Perhubungan	0,24	0,24	0,24	0,20
2.	Sasaran OPD : Terwujudnya Pelayanan Transportasi yang Handal, Berdaya Saing dan memberikan Nilai Tambah dalam rangka mewujudkan konektivitas antar simpul dan moda Transportasi	Persentase Fasilitas Keselamatan Jalan	39.96	42.22	52.33	60.00

Berdasarkan tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa pencapaian indikator kinerja terhadap tujuan OPD belum mencapai 100 persen dari target 0,20 yang ditetapkan pada tahun 2023 (berdasarkan dokumen perencanaan jangka menengah) tercapai 0,24 (83,33 %), Pada tahun 2022 target terhadap Indeks sarana dan prasarana perhubungan sebesar 0,22 dengan capaian kinerja sebesar 0,24 (91,66%), sehingga jika dibandingkan tahun 2022 dengan tahun 2023 capaiannya sama yakni 0,24. Hal positif yang dapat diambil dari capaian indikator kinerja tahun 2022 dan tahun 2023 adalah menunjukkan bahwa konektivitas antar wilayah kabupaten semakin baik dalam mendukung perekonomian dan aktivitas masyarakat, karena volume kendaraan semakin bertambah yang melewati jalan-jalan yang ada sementara kapasitas jalan tetap.

Sementara untuk capaian persentase fasilitas keselamatan jalan yang menjadi indikator kinerja terhadap sasaran OPD sampai dengan tahun 2023 mencapai 52,33 % dari target yang ditetapkan pada periode akhir perencanaan jangka menengah sebesar 60 %. Salah satu faktor yang menjadi penyebab belum mencapai 60% ketersediaan fasilitas keselamatan jalan adalah masih banyaknya titik/lokasi yang belum trpenuhi akan fasilitas penerangan jalan umum yang menjadi salah satu unsur pemenuhan kebutuhan fasilitas keselamatan jalan, sehingga kedepan untuk penerangan jalan umum tersebut menjadi target/kegiatan utama pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur.

Adapun target dan realisasi indikator masing-masing program/kegiatan/sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2023 diuraikan pada tabel berikut :

NO	PROGRAM	SATUAN	TARGET	REALISASI	%
<b>I</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	%	<b>100</b>	<b>96,66</b>	<b>96,66</b>
1.1	Administrasi Keuangan PD	%	100	97,05	97,05
	Penyediaan Gaji & Tunjangan ASN	Orang/Bln	588	570,10	96,96
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	12	100,00

NO	PROGRAM	SATUAN	TARGET	REALISASI	%
1.2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	59,27	59,27
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket	95	47,42	49,92
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	156	104,95	67,28
1.3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	98,92	98,92
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan	12	9,76	81,33
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	12	11,99	99,89
1.4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	85,09	85,09
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	27	23,27	86,18
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	20	0	0
<b>II</b>	<b>Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)</b>	<b>%</b>	<b>82</b>	<b>56,58</b>	<b>68,99</b>
2.1	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten / Kota	%	80	35,02	43,78
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	unit	80	35,02	43,78
2.1	Penertiban Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	%	75	75,00	100,00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten / Kota	Laporan	12	12	100,00
2.3	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	%	80	60,67	75,84
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Unit	8	8	100,00
	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala	Unit	7.951	4.323,44	54,38
	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala	Dokumen	5.500	2.812,03	51,13
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Unit	8	4,74	59,24
<b>III</b>	<b>Program Pengelolaan Pelayaran</b>	<b>%</b>	<b>78</b>	<b>78</b>	<b>100,00</b>
3.1	Pembangunan, Penertiban Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	%	78	78	100,00
	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Unit	2	2	100,00

#### **A.4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standar Nasional**

LOS (*Level of Service*) atau tingkat pelayanan jalan adalah salah satu metode yang digunakan untuk menilai kinerja jalan yang menjadi indikator dari kemacetan. Suatu jalan dikategorikan mengalami kemacetan apabila hasil perhitungan LOS menghasilkan nilai mendekati 1. Dalam menghitung LOS di suatu ruas jalan, terlebih dahulu harus mengetahui kapasitas jalan (C) yang dapat dihitung dengan mengetahui kapasitas dasar, faktor penyesuaian lebar jalan, faktor penyesuaian pemisah arah, faktor penyesuaian pemisah arah, faktor penyesuaian hambatan samping, dan faktor penyesuaian ukuran kota (MKJI, 1997).

Volume adalah jumlah kendaraan yang melalui suatu titik pada suatu jalur gerak per satuan waktu yang biasanya digunakan satuan kendaraan per waktu (Morlok, 1978). Satuan yang digunakan dalam menghitung volume lalu lintas (V) adalah satuan mobil penumpang (SMP). Untuk menunjukkan volume lalu lintas pada suatu ruas jalan maka dilakukan dengan pengalihan jumlah kendaraan yang menggunakan ruas jalan tersebut dengan faktor ekivalensi mobil penumpang (EMP).

ekivalensi mobil penumpang (EMP) adalah satuan arus lalu lintas dari berbagai tipe kendaraan yang diubah menjadi kendaraan ringan (termasuk mobil penumpang) dengan menggunakan faktor EMP dan nilai EMP merupakan faktor konversi dari berbagai jenis kendaraan.

*Level of Service* (LOS) dapat diketahui dengan melakukan perhitungan perbandingan antara volume lalu lintas dengan kapasitas dasar jalan ( $V/C$ ). Dengan melakukan perhitungan terhadap nilai LOS, maka dapat diketahui klasifikasi jalan atau tingkat pelayanan pada suatu ruas jalan tertentu.

Berikut tabel tingkat pelayanan yang telah dijabarkan berdasarkan MKJI :



No.	Tingkat Pelayanan	Rasio V/C	Karakteristik
1.	A	$< 0,60$	Arus bebas, volume rendah dan kecepatan tinggi, pengemudi dapat memilih kecepatan yang dikehendaki
2.	B	$0,60 < V/C < 0,70$	Arus stabil, kecepatan sedikit terbatas oleh lalu lintas, pengemudi masih dapat bebas dalam memilih kecepatannya.
3.	C	$0,70 < V/C < 0,80$	Arus stabil, kecepatan dapat dikontrol oleh lalu lintas
4.	D	$0,80 < V/C < 0,90$	Arus mulai tidak stabil, kecepatan rendah dan berbeda-beda, volume mendekati kapasitas
5.	E	$0,90 < V/C < 1$	Arus tidak stabil, kecepatan rendah dan berbeda-beda, volume mendekati kapasitas
6.	F	$> 1$	Arus yang terhambat, kecepatan rendah, volume diatas kapasitas, sering terjadi kemacetan pada waktu yang cukup lama.

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa kondisi arus jalan di Kabupaten Lombok Timur pada Tahun 2023 berada pada tingkat pelayanan **Kategori A** karena masih berada pada **angka 0,24** (realisasi sampai bulan Desember 2023), jauh dibawah angka 0,60 sebagai nilai standar pada tingkat pelayanan di kategori A. Artinya bahwa kondisi arus jalan secara umum di Kabupaten Lombok Timur dalam kondisi arus bebas, volume masih rendah dan pengemudi dapat memilih kecepatan yang dikehendaki.

#### **A.5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi**

1. Terkait dengan Kenaikan Persentase capaian realisasi kinerja sampai pada bulan Desember 2023, disebabkan oleh bertambahnya lahan parkir di kabupaten Lombok Timur, dimana pada Tahun 2021 tercatat sejumlah 143 Lokasi Area Parkir dan pada bulan Desember tahun 2023 mengalami

kenaikan sejumlah 291 Lokasi Area Parkir dengan rincian jumlah lokasi parkir tepi jalan sebanyak 154 dan lokasi khusus parkir sebanyak 137 (berdasarkan Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 188.45/558/HUB/2022, tanggal 6 Desember 2022 tentang Penetapan Lokasi Parkir tepi jalan umum dan Tempat Khusus Parkir yang dikelola pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur). Upaya yang dilakukan oleh pimpinan adalah dengan melakukan survey-survey potensi area parkir di sejumlah ruas jalan, tempat-tempat pariwisata, rumah makan, tempat hiburan dan tempat-tempat usaha yang menyediakan tempat parkir. Sampai pada bulan September tahun 2023 mengalami penurunan disebabkan karena beberapa dari pihak ketiga yang ditunjuk kurang menguasai situasi di lapangan dan kurangnya koordinasi dengan juru parkir yang berada dalam wilayah MoU, dimana dalam MoU tersebutpun tidak diuraikan jumlah setoran pada setiap bulannya sebagaimana jumlah MoU yang disepakati (hanya diberi batas tenggang waktu sampai akhir tahun). Sehingga kedepan diharapkan perlunya segera disusun/diterbitkan dasar hukum yang menguatkan pelaksanaan retribusi parkir, baik pada lokasi parkir tepi jalan maupun pada lokasi parkir tempat khusus serta memaksimalkan pelaksanaan kegiatan sesuai anggaran.

2. realisasi anggaran sampai pada Tahun 2023 terbilang Sangat Tinggi karena mencapai 91,96 % dengan realisasi anggaran sebesar Rp.6.996.269.674,- dari pagu anggaran sebesar Rp.7.607.724.188,-.

#### **A.6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Penggunaan Sumber Daya yang relative efisiensi tentunya menjadi prioritas dalam pelaksanaan pencapaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupten Lombok Timur, hal ini disebabkan karena tidak sebanding banyaknya kegiatan yang harus dilaksanakan untuk mendukung

tercapainya indikator kinerja yang menjadi tolok ukur keberhasilan Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur dengan jumlah Sumber Daya Aparatur yang ada. Akan tetapi kekurangan Sumber Daya Aparatur tersebut sedikit terbantu dengan keberadaan Tenaga Pendukung Kegiatan yang ditempatkan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati Lombok Timur berdasarkan perjanjian kerja setiap tahunnya.

Ketiadaan tenaga PPNS Penyidik bidang LLAJ sampai saat ini pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur juga menjadi faktor penghambat pencapaian kinerja OPD, Usulan ke BKPDMD Kabupaten Lombok Timur yang menjadi pengampu kegiatan Pengembangan SDM sudah disampaikan setiap tahun, akan tetapi karena keterbatasan anggaran maka sampai saat ini belum dapat direalisasikan. Namun untuk mengoptimalkan capaian indikator kinerja, untuk mewujudkan pengembangan SDM Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur telah mengirim beberapa tenaga pendukung kegiatan untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan, diantaranya adalah

- ✓ Diklat Pengaturan Lalu Lintas
- ✓ Diklat Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan
- ✓ Diklat Dasar Transportasi Darat
- ✓ Diklat Orientasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan
- ✓ Diklat Pengadaan dan Pemasangan APILL

Begitu juga dengan keterbatasan sarana prasarana keselamatan jalan yang sampai pada bulan Desember tahun 2023 tercatat sebanyak 14.624 buah atau 52.33 % dari 27.945 buah yang harus dimiliki agar keselamatan jalan dapat terwujud secara optimal. Kedepan hal ini akan menjadi prioritas untuk meningkatkan asset sarana prasarana keselamatan jalan yang harus dimiliki oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur, yang akan dimulai dengan penyusunan database sarana prasarana keselamatan jalan yang akan menghimpun seluruh data sarana prasarana keselamatan jalan baik berupa Traffic Light, Rambu Lalu Lintas, RPPJ, Guadrill, Road Barrier, Portal, Deliniator, Lampu Penerangan Jalan Umum dan ZOSS.

## **A.7. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan Kinerja**

Pengukuran kinerja program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur sampai bulan Desember tahun 2023 dapat diuraikan sebagai berikut :

### **a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.**

Program ini diarahkan dengan sasaran untuk memperlancar tugas-tugas Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur dalam hal penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK), Bensin, listrik, Alat Komunikasi Gaji pegawai, Tunjangan dan lain-lainnya. Untuk Mendukung program yang ada, kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- ❖ **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.** Kegiatan didukung dengan anggaran sebesar Rp. 3.917.350.748.- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 3.801.703.703,- atau sebesar 97,05 % ;
- ❖ **Administrasi Umum Perangkat Daerah.** Anggaran yang disiapkan untuk mendukung kegiatan ini sebesar Rp. 118.622.800.- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 70.309.680.- atau 59,27 %;
- ❖ **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.** Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.2.107.033.440.- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 2.084.192.639.- atau sebesar 98,92 %;
- ❖ **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.** Anggaran yang disiapkan untuk mendukung kegiatan ini sebesar Rp. 160.367.200.- dengan realisasi sebesar Rp. 136.448.852.- dan realisasi fisik 85,09 %;

### **b. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)**

Program ini diarahkan untuk mendukung sarana prasarana perhubungan baik fasilitas keselamatan jalan, pengelolaan angkutan, pengujian kendaraan bermotor dan pengelolaan perparkiran. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program ini adalah :

- ❖ **Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota.** Dengan dana sebesar Rp. 474.800.000,- terealisasi keuangan sebesar Rp. 207.852.500,- atau 43,78 %;
- ❖ **Penertiban Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir.** dengan pagu dana sebesar Rp. 83.360.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 83.360.000,- atau sebesar 100,00 %;
- ❖ **Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.** Dengan anggaran sebesar Rp. 734.290.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.600.502.300,- atau presentase sebesar 81,78 %;

#### **c. Program Pengelolaan Pelayaran.**

Program ini diarahkan untuk terwujudnya pembangunan sarana dan prasarana perhubungan laut yang tepat, cepat, aman dan nyaman yang berkesinambungan secara terpadu, menyeluruh dan tersedianya dokumen izin operasional rencana induk kepelabuhan DLKp dan DLKr untuk pelabuhan lokal labuhan haji. Kegiatan untuk mendukung program ini adalah:

- ❖ **Pembangunan, Penertiban Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal.** Anggaran yang disiapkan untuk mendukung kegiatan ini sebanyak Rp.11.900.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.11.900.000,- atau presentase sebesar 100,00 %.

#### **A.8. Permasalahan dan Solusi**

Secara umum permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur sampai dengan bulan September Tahun 2023 dapat diuraikan sebagai berikut:

- ❖ **Sekretariat**
  - Untuk meningkatkan SDM pegawai dinas perhubungan, pada tahun 2023 hanya dapat mengikuti bimbingan teknis bagi pegawai dalam Diklat Pengadaan dan Pemasangan APILL;

- Kurangnya tenaga ASN di subbagian keuangan dan pelaporan yang memiliki basic akuntansi dan di subbagian umum dan kepegawaian yang menangani pengelolaan kepegawaian;

❖ **Bidang Lalu Lintas dan Angkutan (LLA)**

Kurangnya Tenaga Teknis antara lain :

- Staf teknis yang menangani urusan manajemen rekayasa lalu lintas;
- Tenaga PPNS Penyidik bidang LLAJ;
- Penerapan retribusi parkir secara online oleh petugas parkir belum dapat diterapkan karena terbentur anggaran untuk membuat Aplikasi Pengelolaan Parkir.

❖ **Bidang Pengembangan dan Teknik**

a. Kurangnya tenaga teknis antara lain :

- Tenaga Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor;
- Tidak tersedianya anggaran untuk Diklat penjenjangan kompetensi penguji kendaraan.

b. Belum adanya database pendataan fasilitas keselamatan jalan yang lebih baik akuntabel;

c. Gedung Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor tidak representatif, karena tidak tersedianya toilet khusus bagi wajib retribusi pada ruang pelayanan;

d. Belum maksimalnya perlengkapan standar keselamatan kerja bagi penguji kendaraan bermotor;

e. Tidak tersedianya staf yang memiliki kompetensi pemeliharaan APILL.

❖ **Bidang Prasarana**

a. Kurangnya Tenaga Teknis :

- Tenaga S1 Teknik Perkapalan;
- Tenaga S1 Manajemen Transportasi Laut;
- Tenaga Diploma IV/Diploma III Nautika ANT-III;

- Tenaga Diploma IV Ketatalaksanaan Angkutan Laut dan Kepelabuhanan/KALK;
- b. Terbatasnya staf PNS, sehingga untuk berbagi tugas dan pelaksanaan kegiatan tidak efektif;
- c. Permasalahan pada bidang prasarana dalam keterkaitannya dengan kepelabuhanan yakni masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung Dermaga Pelabuhan Lokal Labuhan Haji, seperti gudang pelabuhan fasilitas bongkar muat.

Adapun solusi yang dapat dilakukan untuk memecahkan berbagai permasalahan yang ada dapat diuraikan sebagai berikut :

❖ **Sekretariat**

- a. Berkoordinasi dan menyampaikan usulan ke OPD yang menangani pengadaan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) baik tingkat daerah, provinsi maupun tingkat pusat serta mengusulkan kebutuhan ASN di bagian Keuangan dan pelaporan serta di bagian umum dan kepegawaian;
- b. Adanya Sarana dan Parasara untuk menunjang Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Bimbingan Teknis yang dilaksanakan Pusat maupun Provinsi di Masing-masing Kabupaten/Kota;

❖ **Lalu Lintas dan Angkutan**

- a. Segera dilakukan penambahan sumber daya yang berkualitas dan memiliki kemampuan teknis di Bidang Perhubungan Darat sesuai kualifikasi Pendidikan Perhubungan Darat seperti lulusan STTD (Sekolah Tinggi Transportasi Darat);
- b. Melakukan survey angkutan umum sebagai data induk (database);
- c. Berkoordinasi dan studi banding ke daerah yang sudah lebih dahulu menerapkan pengelolaan parkir secara online;
- d. Mengusulkan kepada pemerintah daerah untuk mengisi jabatan yang kosong pada seksi/sub koordinator lalu lintas;
- e. Mengusulkan kepada pemerintah daerah agar dapat menganggarkan biaya diklat PPNS Penyidik bidang LLAJ;

❖ **Bidang Pengembangan dan Teknik**

- a. Mengusulkan ke Pemerintah Daerah terkait pengadaan ASN yang memiliki kualifikasi khusus bidang Pengujian Kendaraan Bermotor (lulusan DII/DIII PKB) dan Penganggaran Diklat PKB Kompetensi Dasar dan Kompetensi jenjang berikutnya;
- b. Menyediakan anggaran secara rutin setiap tahun untuk perbaikan dan pemeliharaan peralatan uji kendaraan, pembelian alat baru untuk mengganti alat uji yang rusak berat dan anggaran untuk renovasi gedung pelayanan pengujian yang representatif untuk kenyamanan wajib pengujian kendaraan;
- c. Mengusulkan ke Pemerintah Daerah terkait penganggaran Diklat Teknisi APILL (Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas/Traffic Light).
- d. Mengusulkan anggaran untuk survey dan penyusunan database fasilitas keselamatan jalan

❖ **Bidang Prasarana**

- a. Penambahan Tenaga Teknis S1 Teknik Perkapalan, S1 Manajemen Transportasi Laut, Diploma IV Nautika/Diploma II Nautika ANT-III, D-IV Ketatalaksanaan Angkutan Laut dan Kepelabuhanan;
- b. Fasilitas perlu dilengkapi sesuai persyaratan Kepelabuhanan seperti gudang pelabuhan, mushalla dan fasilitas bongkar muat.

Selain solusi yang dapat dilakukan untuk memecahkan berbagai permasalahan yang ada seperti yang telah diuraikan diatas, adapun beberapa inovasi Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur yang sudah diterapkan untuk mendukung keberhasilan dan pencapaian target Program/Kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2023 adalah :

1. Di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan melalui Sub Bidang Angkutan, telah ditetapkan Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 188.45/558/HUB/2022 tanggal 06 Desember 2022



tentang Penetapan Lokasi Parkir Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir yang Dikelola pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur dalam Wilayah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2022, dimana Keputusan ini untuk dijadikan bahan dan rujukan dalam pengelolaan perparkiran yang lebih baik kedepannya.

2. Di Bidang Pengembangan dan Teknik pada Sub Bidang Pengujian Sarana dan Terminal, telah dilakukan upaya yang lebih baik, baik untuk pihak wajib uji Kendaraan Bermotor yang akan melakukan pengujian kendaraan bermotornya maupun untuk pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur dalam hal pelaporan, diantara upaya yang telah dilakukan adalah :

a) Pendaftaran yang akan dilakukan oleh wajib uji kendaraan bermotor tidak hanya secara manual, akan tetapi dapat dilakukan secara online melalui scan QR;



b) Pembayaran dilakukan secara non tunai melalui EDC, Qris dan M Banking (yang sudah dikerjasamakan dengan PT. Bank NTB) dengan nomor Rekening 0020100006256 (An. Dishub Retribusi PKB)

c) Seluruh Aktivitas pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor sampai dengan pelaporannya terbaca secara otomatis melalui Aplikasi SIM PKB



## B. Realisasi Anggaran

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur pada tahun anggaran 2023 sebanyak 8 (delapan) kegiatan dan 15 (lima belas) subkegiatan yang dibiayai dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023. Dari hasil pengukuran terhadap kegiatan sampai dengan bulan September tahun 2023 dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kegiatan mencapai hasil yang cukup baik dimana semua kegiatan bisa diukur indikator kinerjanya, baik indikator input, output maupun indikator hasil.

Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur dapat diuraikan sebagai berikut:

Anggaran Pendapatan Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur secara garis besar dibagi dalam 2 jenis yaitu Anggaran Pendapatan dan Anggaran Belanja yang perbandingannya dapat dilihat pada tabel 1 di bawah ini:

**TABEL 1**  
**RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN, BELANJA**  
**DAN REALISASI PER 31 DESEMBER 2023**

No	Uraian	Jumlah (Rp)	Realisasi	%
1	Pendapatan	9.000.000.000	2.648.251.454	29.43
2	Belanja	7.607.724.188	6.996.269.674	91.96
	<b>Surplus/ (defisit)</b>	<b>1.392.275.812</b>	<b>(4.348.018.220)</b>	

Berdasarkan Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2023 sampai dengan Akhir Tahun 2023 di atas, Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur diberikan Target realisasi Anggaran Pendapatan maupun Anggaran Belanja yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

### **B.1. Anggaran Pendapatan dan Realisasi**

Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur ditargetkan menerima pemasukan asli pendapatan daerah Tahun 2023 sebesar: Rp.9.000.000.000,- yang mana dalam pencapaian target realisasinya sampai dengan akhir tahun 2023 yaitu dapat di lihat pada Tabel 2 di bawah ini :

**TABEL 2  
RENCANA TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN  
TAHUN 2023**

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>TARGET TRIWULAN (RP)</b>	<b>CAPAIAN (RP)</b>	<b>Persentase (%)</b>
1.	Pendapatan Asli Daerah Triwulan I	1.350.900.000	554.369.827	41,04
2.	Pendapatan Asli Daerah Triwulan II	2.549.700.000	386.773.050	15.17
3.	Pendapatan Asli Daerah Triwulan III	2.549.700.000	468.616.777	18.38
4.	Pendapatan Asli Daerah Triwulan IV	2.549.700.000	1.238.491.800	48.57-
<b>JUMLAH</b>		<b>9.000.000.000</b>	<b>2.648.251.454</b>	<b>29.43</b>

Dari Tabel di atas dapat disimpulkan bahwa Capaian Kinerja Pendapatan Asli Daerah dari yang ditargetkan kepada Dinas Perhubungan sampai dengan 31 Desember 2023 mencapai 29,43% atau sebesar Rp.2.648.251.454,- (Dua Milyar Enam Ratus Empat Puluh Delapan Juta Dua Ratus Lima Puluh Satu Ribu Empat Ratus Lima Puluh Empat Rupiah), hal ini disebabkan beberapa faktor untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel 3 berikut ini :

**TABEL 3  
REALISASI PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH  
SAMPAI 31 DESEMBER 2023**

<b>NO</b>	<b>JENIS PENERIMAAN</b>	<b>TARGET</b>	<b>REALISASI PER 31 DES 2023</b>	<b>DALAM PERSEN (%)</b>
1.	<b>Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan Umum</b>	<b>1.500.000.000</b>	<b>150.923.000</b>	<b>10,06</b>
	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.500.000.000	150.923.000	10,06
2.	<b>Retribusi pengujian kendaraan bermotor</b>	<b>3.000.000.000</b>	<b>854.578.600</b>	<b>28,49</b>
	Retribusi pengujian kendaraan bermotor	3.000.000.000	854.578.600	28,49

NO	JENIS PENERIMAAN	TARGET	REALISASI PER 31 DES 2023	DALAM PERSEN (%)
3.	<b>Retribusi Jasa Usaha</b>	<b>3.100.000.000</b>	<b>858.899.854</b>	<b>27,71</b>
	Retribusi tempat khusus parkir	2.350.000.000	608.400.000	25,89
	Retribusi pelayanan kepelabuhan	750.000.000	250.499.854	33,40
4.	<b>Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan</b>	<b>1.400.000.000</b>	<b>783.850.000</b>	<b>55,99</b>
	Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	1.400.000.000	783.850.000	55,99
<b>JUMLAH</b>		<b>9.000.000.000</b>	<b>2.648.251.454</b>	<b>29,43</b>

Dari tabel di atas dapat terlihat komposisi PAD yang menjadi target Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur. Capaian kinerja keuangan dari Pendapatan Asli Daerah tidak dapat memenuhi target s/d 31 Desember 2023 disebabkan oleh adanya target PAD yang ditetapkan oleh pemerintah daerah jauh lebih tinggi dibandingkan hasil uji petik yang ada untuk masing-masing sumber retribusi PAD.

Untuk Parkir terutama parkir tepi jalan umum terkendala oleh beberapa dari pihak ketiga yang ditunjuk kurang menguasai situasi di lapangan dan kurangnya koordinasi dengan juru parkir yang berada dalam wilayah MoU, dimana dalam MoU tersebutpun tidak diuraikan jumlah setoran pada setiap bulannya sebagaimana jumlah MoU yang disepakati (hanya diberi batas tenggang waktu sampai akhir tahun).

## B.2. Anggaran Belanja dan Realisasi

Ikhtisar realisasi pencapaian target Anggaran Belanja Keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur dapat di uraikan sebagai berikut :

- Anggaran Belanja sebesar Rp.7.607.724.188,- dengan komposisi belanja Operasi sebesar Rp.7.212.224.188,- dan belanja Modal sebesar Rp.395.500.000,- diuraikan pada tabel 4 di bawah ini:

**Tabel 4**  
ANGGARAN BELANJA DAN REALISASI  
PERIODE JANUARI s/d 31 DESEMBER 2023

URAIAN	JUMLAH	REALISASI	PERSENTASE
<b>Belanja Operasi</b>	<b>7.212.224.188</b>	<b>4.544.903.472</b>	<b>91,63</b>
- Belanja Pegawai	3.917.350.748	3.801.703.703	97,06
- Belanja Barang dan Jasa	3.294.873.440	2.806.565.971	85,18
- Belanja Hibah	0	0	0
- Belanja Bantuan Sosial	0	0	0

URAIAN	JUMLAH	REALISASI	PERSENTASE
<b>Belanja Modal</b>	<b>395.500.000</b>	<b>388.000.000</b>	<b>98.10</b>
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	395.500.000	388.000.000	98.10
- BM Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0	0	0
<b>JUMLAH</b>	<b>7.607.724.188</b>	<b>6.996.269.672</b>	<b>91,96</b>

Belanja Pegawai yaitu belanja gaji PNS dan Tunjangan terealisasi 97.06 persen dan Belanja Barang Jasa terealisasi 85.18 persen.

Perbandingan Belanja Operasional yang terdiri dari Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa dengan Belanja Modal dapat dilihat dari Tabel 5 Berikut ini:

**TABEL 5**  
**PERBANDINGAN ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA**  
**PERIODE JANUARI s/d 31 DESEMBER 2023**

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Belanja Operasional	<b>7.212.224.188</b>	<b>4.544.903.472</b>	<b>91,63</b>
2.	Belanja Modal	<b>395.500.000</b>	<b>388.000.000</b>	<b>98.10</b>
<b>Jumlah Belanja</b>		<b>7.607.724.188</b>	<b>6.996.269.672</b>	<b>91,96</b>

Ikhtisar Capaian Kinerja Keuangan Anggaran Belanja Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur yang dibagi untuk Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung yang diperuntukkan dalam 15 Subkegiatan dapat dijelaskan seperti pada tabel 6 berikut :

**TABEL 6**  
**KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN REALISASI**  
**PERIODE JANUARI s/d 31 DESEMBER 2023**

NAMA KEGIATAN / SUBKEGIATAN	ANGGARAN 1 TAHUN	REALISASI (S.D DES 2023)	%
1	2	3	4
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.917.350.748	3.801.703.703	97.05
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.799.750.748	3.684.103.703	96.96
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	117.600.000	117.600.000	100.00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	118.622.800	70.309.680	59.27
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	54.698.800	27.304.500	49.92
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	63.924.000	43.005.180	67.28
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.107.033.440	2.084.192.639	98.92
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	110.400.000	89.788.241	81.33
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.996.633.440	1.994.404.398	99.89
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	160.367.200	136.448.852	85.09
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	158.337.200	136.448.852	86.18

<b>NAMA KEGIATAN / SUBKEGIATAN</b>	<b>ANGGARAN 1 TAHUN</b>	<b>REALISASI (S.D DES 2023)</b>	<b>%</b>
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.030.000	0	0
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten / Kota	474.800.000	207.852.500	43.78
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	474.800.000	207.852.500	43.78
Penertiban Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	83.360.000	83.360.000	100.00
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	83.360.000	83.360.000	100.00
Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	734.290.000	60.0502.300	81.78
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	320.000.000	320.000.000	100.00
Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	19.161.000	12.212.300	63.74
Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	133.000.000	113000000	84.96
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	262.129.000	155290000	59.24
Pembangunan, Penertiban Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	11.900.000	11.900.000	100.00
Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	11.900.000	11.900.000	100.00
<b>JUMLAH</b>	<b>7.415.197.152</b>	<b>4.932.903.472</b>	<b>66.52</b>

## **BAB IV PENUTUP**

### **4.1. Kesimpulan**

Dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2023 dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- a. Capaian Indikator Kinerja terhadap Tujuan yang ditetapkan yakni Indeks Sarana Prasarana Perhubungan, pada tahun 2023 berada pada posisi 0,24 dari target yang ditetapkan 0,20 atau dengan capaian 83,33 %, sementara untuk capaian Indikator Kinerja terhadap Sasaran OPD yakni Persentase Fasilitas Keselamatan Jalan, pada tahun 2023 baru mencapai 14.624 Unit dari jumlah yang dibutuhkan sebanyak 27.945 Unit atau 52,33%.
- b. Dari hasil pengukuran terhadap 3 (tiga) program, 8 (delapan) kegiatan dan 15 (lima belas) Subkegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2023, pelaksanaan seluruh kegiatan tersebut dapat dikatakan cukup memuaskan, karena kegiatan yang dilaksanakan realisasi keuangannya mencapai 91,96 persen.
- c. Semua kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur dapat diukur indikator kinerjanya baik indikator Input, Output maupun Outcomes. Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) Lampiran I.
- d. Keberhasilan dalam melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur tidak terlepas dari sinergi yang mantap antar sektor dan semua unit kerja yang ada pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur.



## 4.2. Saran dan Rekomendasi

Berkenaan dengan apa yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya maka beberapa saran/rekomendasi yang dapat dikemukakan sebagai berikut :

- a. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia perlu dilaksanakan secara terus-menerus khususnya aparatur guna membentuk citra aparatur yang disiplin, profesional, produktif dan berdedikasi tinggi, sehingga mampu meningkatkan kinerjanya untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi OPD;
- b. Lebih mengedepankan konsep pembangunan dan peningkatan keselamatan dalam berlalu lintas, peningkatan informasi pelayanan publik, partisipatif, akumulatif dan suistunable;
- c. Semakin menekankan fungsi dari dokumen-dokumen perencanaan baik jangka pendek, menengah maupun jangka panjang sebagai guidelines pelaksanaan program-program kegiatan pembangunan, terutama perlu adanya Tatralok (Tatanan Transportasi Lokal) Wilayah Kabupaten Lombok Timur sehingga arah pembangunan transportasi yang handal di daerah menjadi semakin jelas dan berkesinambungan;
- d. Dukungan personil dan anggaran yang memadai dalam upaya peningkatan pelaksanaan kegiatan dan kesinambungan tugas pokok dan fungsi organisasi untuk dapat berjalan dengan baik dan lancar.



**FORMULIR PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2023  
DINAS PERHIBUNGAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR**


NO	SASARAN OPD	SASARAN PROGRAM	SUBKEGIATAN				% Pencapaian Target	
			Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	
	Terwujudnya Pelayanan Transportasi yang Handal, Berdaya Saing dan Memberi Nilai Tambah dalam Rangka Mewujudkan Konektivitas Antar Simpul dan Moda Transportasi	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelayanan yang Terawat dan Berfungsi Baik untuk Mendukung Pelaksanaan Program	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Input : Tersedianya dana	Rp	3.799.750.748	3.684.103.703	96,96
				Output : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	588	570	96,96
				Outcomes : Persentase Penatausahaan keuangan sesuai rencana	%	100	96,96	96,96
			2 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Input : Tersedianya dana	Rp	117.600.000	117.600.000	100,00
				Output : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	12	100,00
				Outcomes : Persentase Penatausahaan keuangan sesuai rencana	%	100	100	100,00
			3 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Input : Tersedianya dana	Rp	54.698.800	27.304.500	49,92
				Output : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	95	47,42	49,92
				Outcomes : Persentase terlaksananya pelayanan umum perangkat daerah	%	100	49,92	49,92
			4 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Input : Tersedianya dana	Rp	63.924.000	43.005.180	67,28
				Output : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	156	104,95	67,28
				Outcomes : Persentase terlaksananya pelayanan umum perangkat daerah	%	100	67,28	67,28
			5 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Input : Jumlah dana	Rp	110.400.000	89.788.241	81,33
				Output : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	9,76	81,33
				Outcomes : Persentase capaian layanan jasa penunjang	%	100	81,33	81,33
			6 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Input : Jumlah dana	Rp	1.996.633.440	1.994.404.398	99,89
				Output : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	11,99	99,89
				Outcomes : Persentase capaian layanan jasa penunjang	%	100	99,89	99,89

NO	SASARAN OPD	SASARAN PROGRAM	SUBKEGIATAN				% Pencapaian Target	
			Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	
		7 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Input : Jumlah dana	Rp	158.337.200	136.448.852	86,18	
			Output : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	27	23,27	86,18	
			Outcomes : Persentase Pemeliharaan barang milik daerah	%	100	86,18	86,18	
			8 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Input : Jumlah dana	Rp	2.030.000	-	-
				Output : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	20	-	-
				Outcomes : Persentase Pemeliharaan barang milik daerah	%	100	-	-
		Tersedianya Layanan Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang Tertib dan Aman	9 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Input : Jumlah dana	Rp	474.800.000	207.852.500	43,78
				Output : Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Unit	80	35,02	43,78
				Outcomes : Persentase terpeliharanya perlengkapan jalan di jalan Kabupaten/Kota	%	80	43,78	54,72
		10 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Input : Jumlah Dana	Rp	83.360.000	83.360.000	100,00	
			Output : Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	12	12	100,00	
			Outcomes : Persentase terdatanya jumlah juru parkir di masing-masing area parkir	%	75	75	100,00	
		11 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Input : Jumlah Dana	Rp	320.000.000	320.000.000	100,00	
			Output : Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	Unit	8	8	100,00	
			Outcomes : Kendaraan yang laik uji di jalan untuk meningkatkan keselamatan berlalu lintas	%	80	80	100,00	
1 Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Input : Jumlah Dana	Rp	19.161.000	12.212.300	63,74			
	Output : Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	Unit	7.951	4.323,44	54,38			

NO	SASARAN OPD	SASARAN PROGRAM	SUBKEGIATAN				% Pencapaian Target	
			Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	
			Outcomes : Kendaraan yang laik uji di jalan untuk meningkatkan keselamatan berlalu lintas	%	80	54,38	67,97	
		2 Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Input : Jumlah Dana	Rp	133.000.000	113.000.000	84,96	
			Output : Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dokumen	5.500,00	2.812,03	51,13	
			Outcomes : Kendaraan yang laik uji di jalan untuk meningkatkan keselamatan berlalu lintas	%	80	51,13	63,91	
		3 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Input : Jumlah Dana	Rp	262.129.000	155.290.000	59,24	
			Output : Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	Unit	8	4,74	59,24	
			Outcomes : Kendaraan yang laik uji di jalan untuk meningkatkan keselamatan berlalu lintas	%	80	59,24	74,05	
	Tersedianya Layanan Penyelenggaraan Pelayaran yang Tertib dan Aman	4 Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Input : Jumlah Dana	Rp	11.900.000	11.900.000	100,00	
			Output : Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara	unit	2	2	100,00	
			Outcomes : Penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal	%	75	100	133,33	
<b>JUMLAH URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN</b>						<b>7.607.724.188</b>	<b>6.996.269.674</b>	<b>91,96</b>

Selang, 02 Januari 2024

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,**

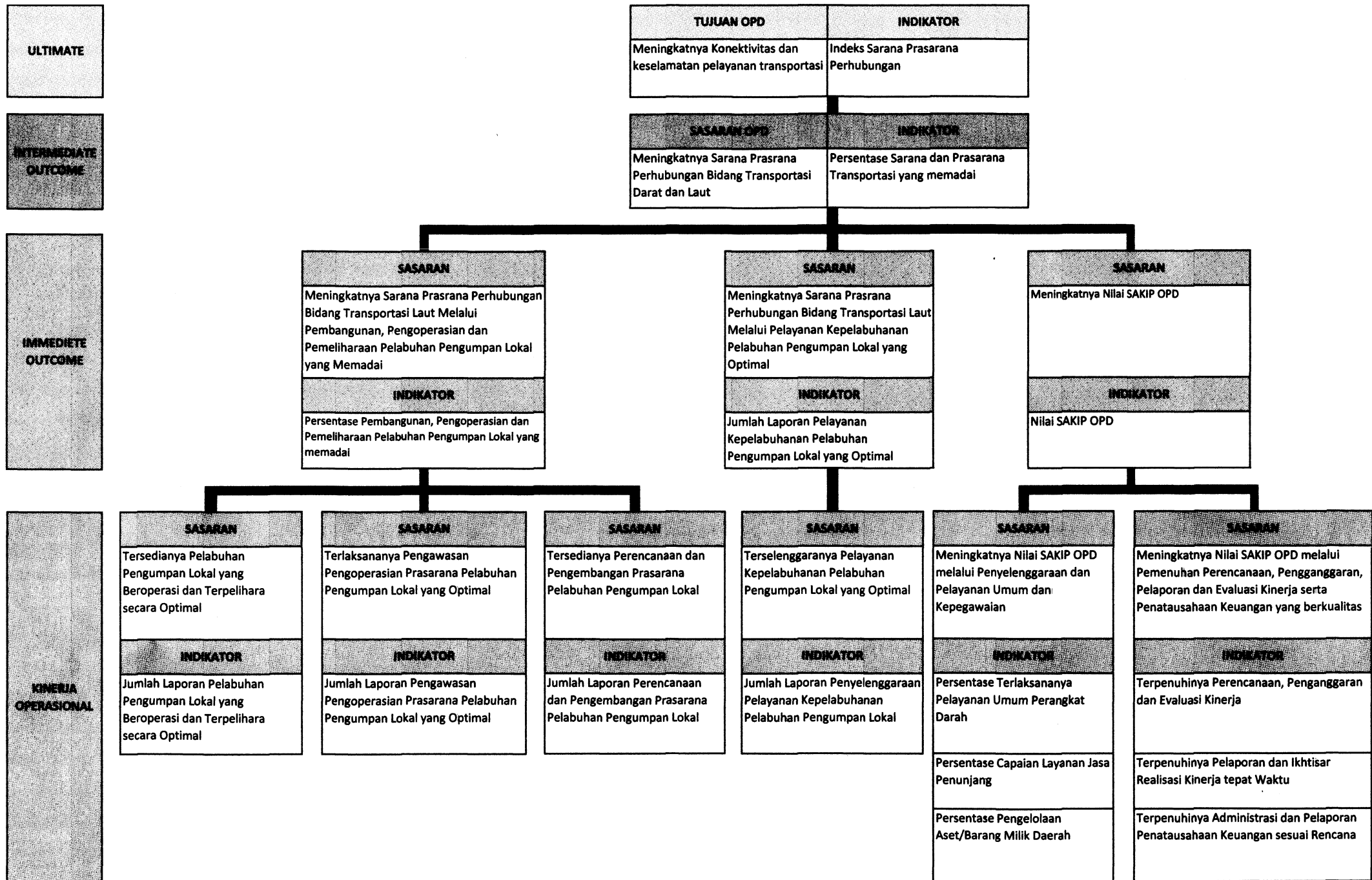


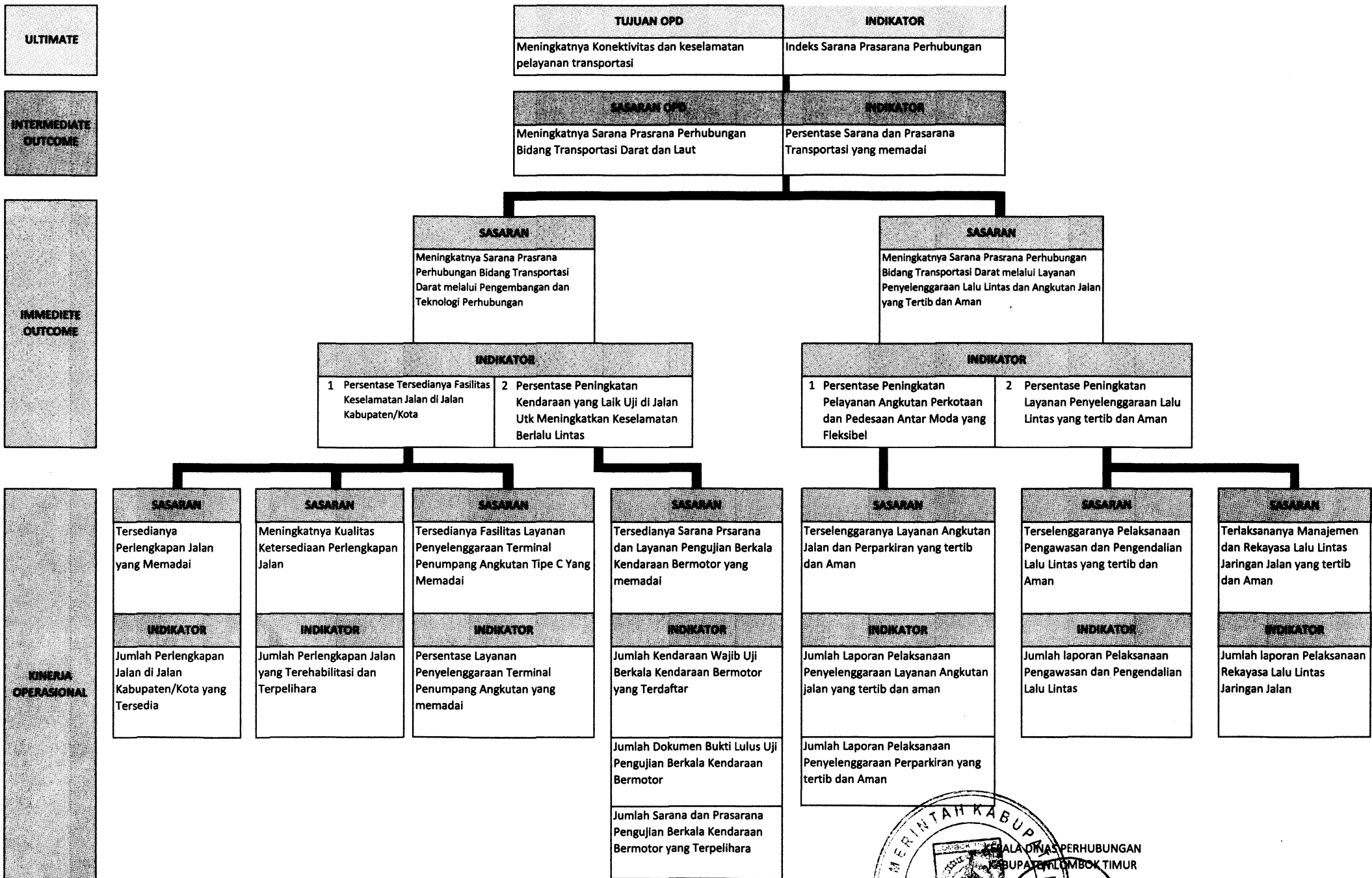
**Drs. ISWAN RAKHMADI, M.M**  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19691216 198903 1 006

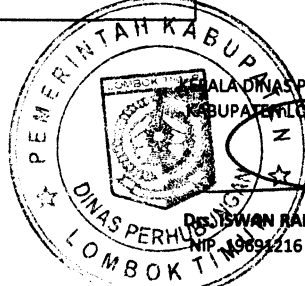
Catatan Ketidaktercapaian Target :

Untuk Indikator Kinerja yang tidak mencapai target sampai 100 % merupakan sisa anggaran yang tidak direalisasikan.

**POHON KINERJA DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2024**






  
 PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
   
 DINAS PERHUBUNGAN
   
 Disyahkan RAKHMADI, M.M
   
 NIP. 19691216 198903 1 006

CASCADING DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2024

ULTIMATE

Tujuan OPD	Indikator	Target
Meningkatnya Konektivitas dan keselamatan pelayanan transportasi	Indeks Sarana Prasarana Perhubungan	0,20
Meningkatnya Sarana Prasarana Perhubungan Bidang Transportasi Darat dan Laut	Persentase Sarana dan Prasarana Transportasi yang memadai	65,64%

STRATEGIS

SASARAN	KEGIATAN	Anggaran (Rp.000)	INDIKATOR	Target
Meningkatnya Sarana Prasarana Perhubungan Bidang Transportasi Darat melalui Pengembangan dan Teknologi Perhubungan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	650.000	Persentase Tersedianya Fasilitas Keselamatan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	83%
			Persentase Peningkatan Kendaraan yang Laik Uji di Jalan Utk Meningkatkan Keselamatan Berlalu Lintas	83%

SASARAN	KEGIATAN	Anggaran (Rp.000)	INDIKATOR	Target
Meningkatnya Nilai SAKIP OPD	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.170.193	Nilai SAKIP OPD	BB

KINERJA OPERASIONAL

SASARAN	KEGIATAN	Anggaran (Rp.000)	INDIKATOR	
			Uraian	Target
Tersedianya Perlengkapan Jalan yang Memadai	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	400.000	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	6 Unit
Meningkatnya Kualitas Ketersediaan Perlengkapan Jalan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	50.000	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	83 Unit
Tersedianya Sarana Prasarana dan Layanan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang memadai	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	19.161	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	5.500 Dok
		65.000	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	3,000 Unit
		115.839	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	14 Unit
Tersedianya Fasilitas Layanan Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Tipe C Yang Memadai	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	-	Persentase Layanan Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan yang memadai	82%

SASARAN	KEGIATAN	Anggaran (Rp.000)	INDIKATOR	
			Uraian	Target
Meningkatnya Nilai SAKIP OPD melalui Penyelenggaraan dan Pelayanan Umum dan Kepegawaian	Administrasi Umum Perangkat Daerah	170.948	Persentase Terlaksananya Pelayanan Umum Perangkat Daerah	100%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.997.133	Persentase Capaian Layanan Jasa Penunjang	100%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	170.436	Persentase Pengelolaan Aset/Barang Milik Daerah	100%
Meningkatnya Nilai SAKIP OPD melalui Pemenuhan Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja serta Penatausahaan Keuangan yang berkualitas	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.000	Terpenuhinya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	9 Dok
			Terpenuhinya Pelaporan dan Ikhtisar Realisasi Kinerja tepat Waktu	5 Dok
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.821.676	Terpenuhinya Administrasi dan Pelaporan Penatausahaan Keuangan sesuai Rencana	2 Dok

ULTIMATE



INDIKATOR

KINERJA OPERASIONAL

Tujuan OPD	Indikator	Target
Meningkatnya Konektivitas dan keselamatan pelayanan transportasi	Indeks Sarana Prasarana Perhubungan	0,20

Meningkatnya Sarana Prasarana Perhubungan Bidang Transportasi Darat dan Laut	Persentase Sarana dan Prasarana Transportasi yang memadai	65,64%
--	---	--------

SASARAN	PROGRAM	Anggaran (Rp.000)	INDIKATOR	Target
Meningkatnya Sarana Prasarana Perhubungan Bidang Transportasi Darat melalui Layanan Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang Tertib dan Aman	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	120.000	Persentase Peningkatan Pelayanan Angkutan Perkotaan dan Pedesaan Antar Moda yang Fleksibel	83%
			Persentase Peningkatan Layanan Penyelenggaraan Lalu Lintas yang tertib dan Aman	78%

SASARAN	KEGIATAN	Anggaran (Rp.000)	INDIKATOR	
			Urutan	Target
Terselenggaranya Layanan Angkutan Jalan dan Perparkiran yang tertib dan Aman	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	-	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyelenggaraan Layanan Angkutan jalan yang tertib dan aman	12 Lap
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyelenggaraan Perparkiran yang tertib dan Aman	12 Lap
Terselenggaranya Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas yang tertib dan Aman	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	60.000	Jumlah laporan Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas	12 Lap
Terlaksananya Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jaringan Jalan yang tertib dan Aman	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	60.000	Jumlah laporan Pelaksanaan Rekayasa Lalu Lintas Jaringan Jalan	12 Lap

SASARAN	KEGIATAN	Anggaran (Rp.000)	INDIKATOR	Target
Meningkatnya Sarana Prasarana Perhubungan Bidang Transportasi Laut Melalui Pembangunan, Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Memadai	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	40.000	Persentase Pembangunan, Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal yang memadai	80%
Meningkatnya Sarana Prasarana Perhubungan Bidang Transportasi Laut Melalui Pelayanan Kepelabuhanan Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Optimal	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	20.000	Jumlah Laporan Pelayanan Kepelabuhanan Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Optimal	12 Lap

SASARAN	SUB-KEGIATAN	Anggaran (Rp.000)	INDIKATOR	
			Urutan	Target
Tersedianya Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara secara Optimal	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	14.000	Jumlah Laporan Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara secara Optimal	12 Lap
			Terlaksananya Pengawasan Pengoperasian Prasarana Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Optimal	12 Lap
Tersedianya Perencanaan dan Pengembangan Prasarana Pelabuhan Pengumpan Lokal	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	13.000	Jumlah Laporan Pengawasan Prasarana Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Optimal	12 Lap
Tersedianya Perencanaan dan Pengembangan Prasarana Pelabuhan Pengumpan Lokal	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	13.000	Jumlah Laporan Perencanaan dan Pengembangan Prasarana Pelabuhan Pengumpan Lokal	4 Lap
Terselenggaranya Pelayanan Kepelabuhanan Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Optimal	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	20.000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pelayanan Kepelabuhanan Pelabuhan Pengumpan Lokal	12 Lap

